

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan dan pembangunan memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam mewujudkan kota yang ideal. Pembangunan wilayah harus didasari dengan kebutuhan lahan dan kebutuhan perekonomian yang direncanakan. Globalisasi yang semakin berkembang menjadi salah satu penyebab yang cukup signifikan dalam mempengaruhi perkembangan di Indonesia baik pemerintah Kota maupun Kabupaten untuk melakukan pembangunan secara fisik. Kegiatan pembangunan yang sangat signifikan sehingga mengharuskan Pemerintah di Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang pembangunan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu UU no 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur agar setiap pembangunan yang dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah saling berkaitan dan terdapat konfigurasi didalamnya.

Setiap pembangunan daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh negara-negara sedang berkembang pada umumnya berorientasi pada bagaimana memperbaiki atau mengangkat tingkat hidup masyarakat pada negara tersebut. Dalam upaya pembangunan wilayah, masalah yang terpenting yang menjadi perhatian para ahli ekonomi dan perencanaan wilayah adalah menyangkut proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Industri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 berarti seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Sedangkan Kawasan Peruntukan Industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Peruntukan Industri. Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara industri karena proporsi ekonominya, yaitu sektor industri merupakan kontributor terbesar bagi perekonomian nasional dengan memiliki proporsi yang mencapai lebih dari 20 persen. Hal ini disampaikan

langsung oleh Menteri Perindustrian, Airlangga Hartato pada Wisuda Universitas Muhammadiyah Malang ke-86 Periode IV Tahun 2017. Berdasarkan jumlah persentasi tersebut, Indonesia termasuk jajaran lima besar negara-negara dunia yang kontribusi industrinya cukup tinggi. Menurut *validnews.id*, Indonesia saat ini memiliki total sebanyak 93 Kawasan Peruntukan Industri yang tersebar di seluruh nusantara dengan total luas 130,10 ribu hektare, di mana sebanyak 55 Kawasan Peruntukan Industri tersebut berada di Pulau Jawa. Total luas Kawasan Peruntukan Industri di Jawa sendiri mencapai angka 117,88 ribu hektare.

Jawa Tengah sendiri memiliki 8 Kawasan Peruntukan Industri dengan lahan yang digunakan seluas 5.652,8 hektare. Jumlah ini akan bertambah seiring banyaknya investor yang ingin menanamkan modalnya di Jawa Tengah. Bupati Batang menyebutkan wilayah yang hendak dibangun Kawasan Peruntukan Industri antara lain adalah Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Kendal, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Semarang. Kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan empat wilayah yang hendak dibangun Kawasan Peruntukan Industri baru yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Kebumen. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri tersebut bertujuan untuk bisa menjaring investor baik lokal maupun asing guna kepentingan terdongkraknya peluang investasi di Jawa Tengah.

Meskipun belum memiliki Kawasan Peruntukan Industri, Kabupaten Batang telah merencanakan untuk memasukkan enam kecamatan ke dalam Kawasan Peruntukan Industri Batang. Terlebih Kabupaten Batang dilalui jalan tol Trans Jawa yang menjadikan Kabupaten Batang memiliki peluang untuk berinvestasi terutama di sektor industri. Enam kecamatan yang direncanakan akan dimasukkan ke dalam Kawasan Peruntukan Industri Batang antara lain adalah Kecamatan Kandeman, Kecamatan Tulis, Kecamatan Subah, Kecamatan Banyuputih, dan Kecamatan Gringsing. Adapun lahan yang disiapkan adalah seluas 5.000 Hektare untuk Kawasan Peruntukan Industri tersebut. Dengan adanya hal tersebut, sangat ada kemungkinan untuk suatu industri baru berinvestasi di Kabupaten Batang.

Pemilihan lokasi usaha oleh suatu organisasi atau perusahaan akan mempengaruhi risiko dan keuntungan atau *risk and profit* perusahaan tersebut secara keseluruhan. Kondisi ini terjadi karena lokasi sangat mempengaruhi biaya tetap maupun biaya variabel, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Di dalam manajemen organisasi, lokasi usaha sebaiknya diperhitungkan pada saat perencanaan sehingga usaha yang akan dijalankan dapat terorganisasi

pelaksanaannya di masa mendatang (Heizer dan Render, 2004). Beberapa kriteria yang ikut dipertimbangkan dalam menentukan lokasi usaha antara lain adalah ketersediaan lahan, bahan baku, energi, aksesibilitas, transportasi, upah buruh, jaminan keamanan, daya serap pasar lokal, stabilitas politik, dan sarana penunjang lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan Kawasan Peruntukan Industri di Indonesia khususnya Jawa Tengah makin pesat seiring dengan kemajuan bidang teknologi yang canggih. Kabupaten Batang menjadi salah satu wilayah yang akan dibangun beberapa Kawasan Peruntukan Industri, sehingga memungkinkan adanya industri baru yang akan berinvestasi di Kabupaten Batang. Oleh karena itu, menentukan lokasi peletakan atau pembangunan industri perlu mempertimbangkan faktor dan kriteria penentuan lokasi industri sehingga didapatkan keuntungan yang optimum dan mencegah adanya penumpukan di titik – titik tertentu yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat.

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan dalam penyusunan Proyek Akhir yang berjudul “Pemanfaatan SIG dalam Penentuan Lokasi Potensial Pengembangan Industri di Kabupaten Batang, Jawa Tengah” ini adalah untuk mengetahui lokasi – lokasi yang berpotensi untuk didirikan industri dengan metode *skoring* dan *overlay* bantuan Sistem Informasi Geografis di Kabupaten Batang.

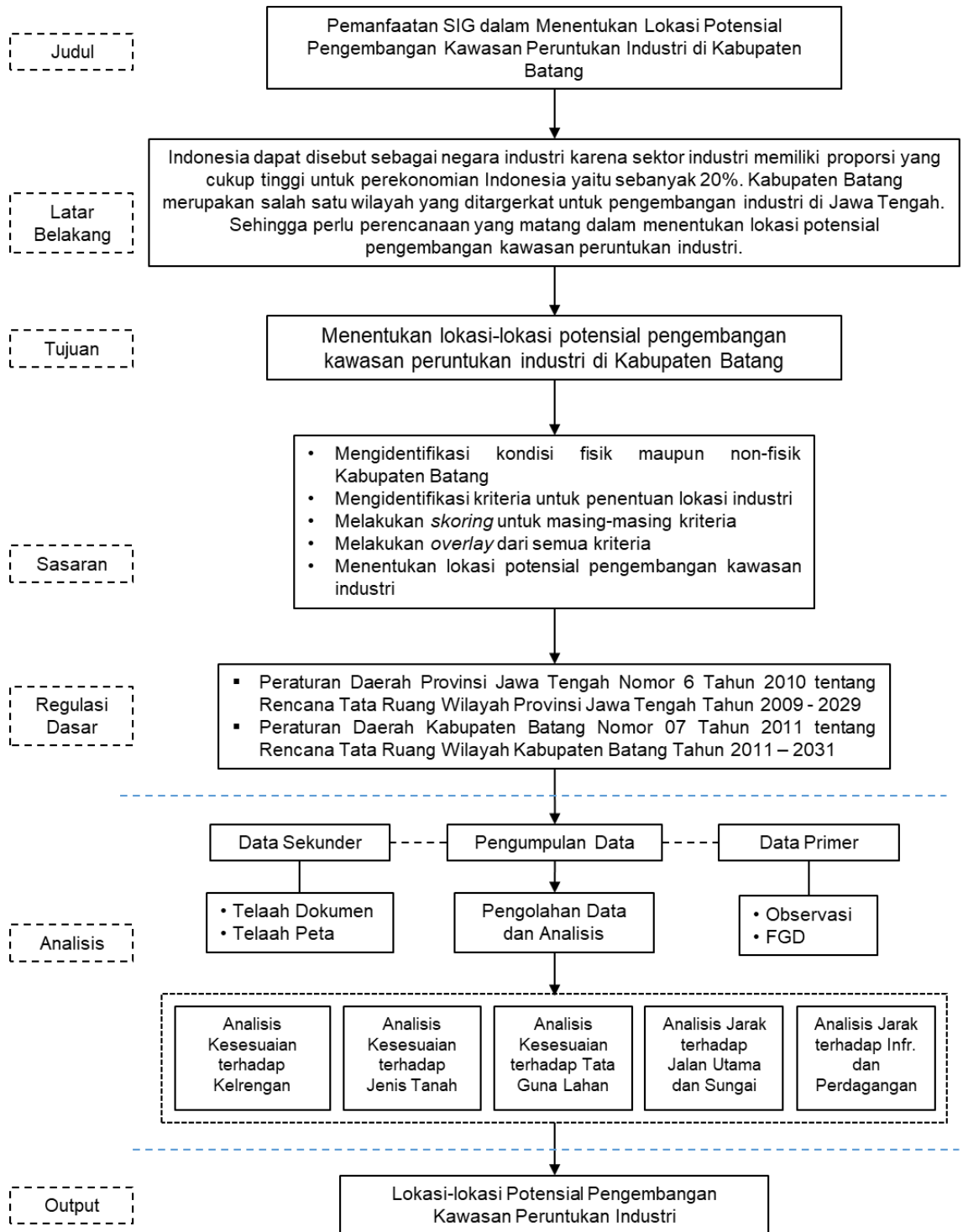
1.3.2 Sasaran

Sasaran yang akan dilakukan guna mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

- Mengidentifikasi kondisi fisik maupun non-fisik Kabupaten Batang
- Mengidentifikasi kriteria untuk penentuan lokasi industri
- Melakukan *skoring* untuk masing-masing kriteria
- Melakukan *overlay* dari semua kriteria
- Menentukan lokasi potensial pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

1.4 Kerangka Analisis

Secara garis besar langkah yang akan dilakukan dalam penentuan tingkat potensi lahan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Batang dapat digambarkan pada diagram kerangka analisis di bawah ini.

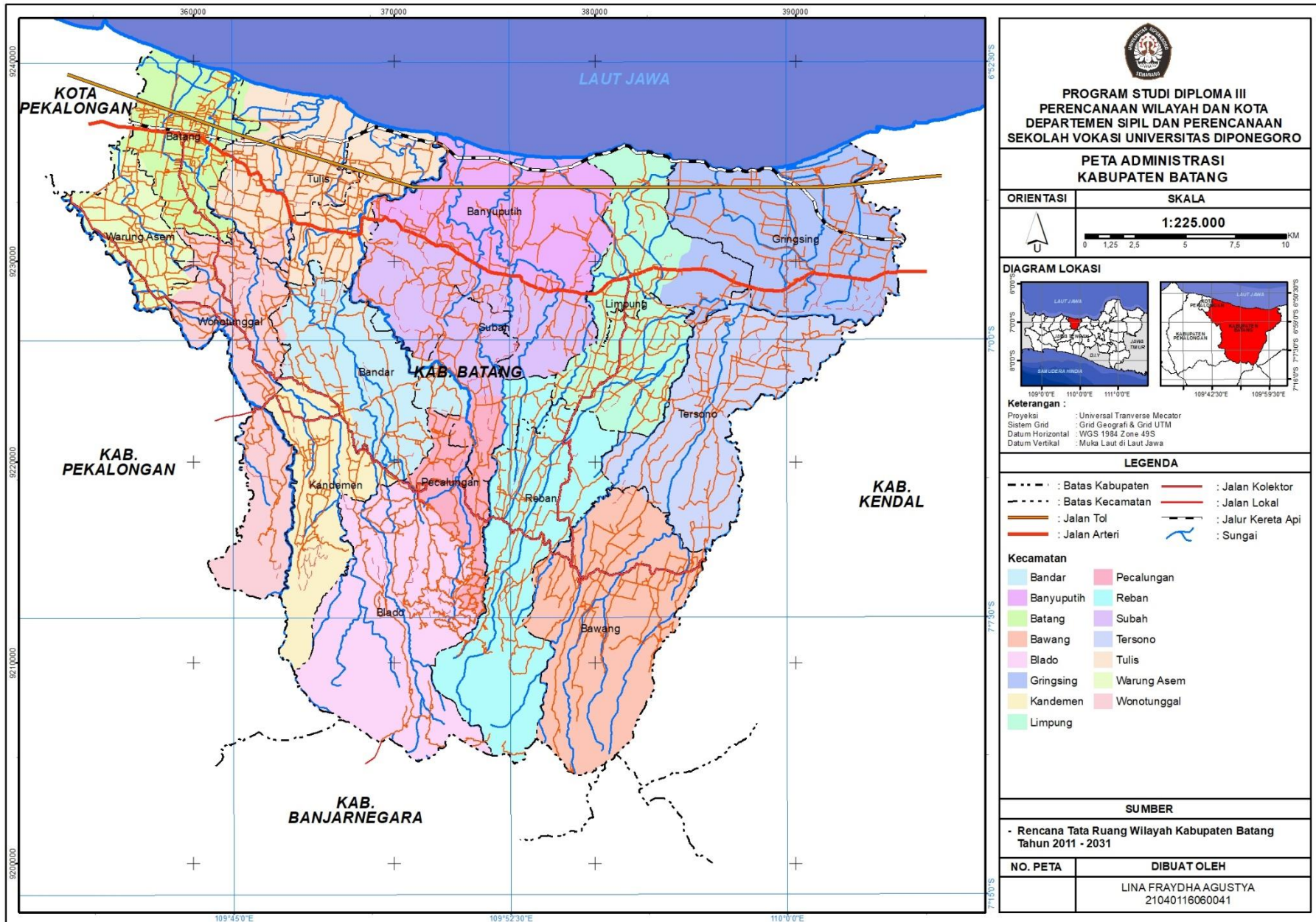


Gambar 1. 1 Kerangka Analisis Tingkat Potensi Lahan untuk Kawasan Peruntukan Industri

1.5 Ruang Lingkup

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam Proyek Akhir ini adalah Kabupaten Batang yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di pesisir utara pantai Jawa. Kabupaten Batang terletak antara $6^{\circ} 51' 46''$ dan $7^{\circ} 11' 47''$ Lintang Selatan dan antara $109^{\circ} 40' 19''$ dan $110^{\circ} 03' 06''$ Bujur Timur. Letak Kabupaten Batang berada pada pesisir pantai utara Pulau Jawa. Kabupaten Batang membentang dari wilayah pantai hingga dataran tinggi mendekati wilayah Dieng. Kabupaten Batang sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten dan Kota Pekalongan, sebelah selatan dengan Kab. Wonosobo dan Kab. Banjarnegara, sebelah timur dengan Kab. Kendal dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Secara administratif Kabupaten Batang terbagi menjadi 15 kecamatan dengan luas wilayah tercatat 78.864,16 Ha. Luas wilayah tersebut terdiri dari 22.003,80 Ha (27,91 %) lahan sawah dan 56.860,36 Ha (72,09%) lahan bukan lahan sawah. Lahan sawah tersebut merupakan lahan sawah berpengairan irigasi (90,86%), lahan sawah sisanya ialah lahan sawah tadah hujan. Lahan bukan lahan sawah digunakan sebagian besar untuk tegal/huma sebesar 21.977,20 Ha, sisanya merupakan perkebunan, hutan negara, bukan pertanian dan lainnya.



Gambar 1. 2 Peta Administrasi Kabupaten Batang

1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Pembahasan dalam ruang lingkup materi ini terkait dengan kriteria – kriteria dan parameter penentuan potensial untuk pengembangan industri di Kabupaten Batang. Kriteria – kriteria dan parameter tersebut mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri. Selain itu, juga referensi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Wahyu Satya Nugraha dkk pada tahun 2014 dengan judul penelitiannya “Penentuan Lokasi Potensial untuk Pengembangan Kawasan Industri Menggunakan Sistem Informasi Geografis”.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada Proyek Akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN yang memuat latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dan sasaran yang akan dilakukan, ruang lingkup yang meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Kemudian sistematika penulisan yang menjelaskan alur pada studi yang dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi industri di Kabupaten Batang.

BAB II KAJIAN TEORI yang memuat tinjauan atau kajian mengenai teori – teori lokasi industri yang digunakan sebagai bahan atau pedoman dalam melakukan analisis kesesuaian faktor pemilihan lokasi.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH yang memuat kondisi atau gambaran umum kawasan studi yakni Kabupaten Batang baik fisik maupun non-fisik.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN yang memuat analisis kriteria lokasi industri dengan metode *skoring* dan *overlay* pada peta tematik dengan menggunakan software ArcGIS. Teori yang digunakan pada Proyek Akhir ini adalah teori lokasi industri Weber. Dilakukan juga pembobotan pada tiap kriteria guna mengetahui lokasi yang berpotensi untuk didirikan industri.

BAB V PENUTUP yang memuat kesimpulan dan *lesson learned* dari hasil pembahasan dan analisa yang telah dijelaskan di bab sebelumnya.